



PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH

PUBLIC PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM POTENTIAL IN BANGGAI LAUT REGENCY, CENTRAL SULAWESI PROVINCE

Murna A. Bando^{1*}, Zuchri Abdussamad², Yacob Noho Nani³

^{1*,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Email: murnabando@gmail.com

*email koresponden: murnabando@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2702>

Abstrack

The tourism sector is one of the strategic sectors that contributes to regional economic growth, improves community welfare, and creates business and employment opportunities. The success of tourism development depends not only on the role of the government but also on the active participation of the community as a key stakeholder in achieving sustainable tourism development. This study aims to analyze public participation in the development of tourism potential in Banggai Laut Regency, Central Sulawesi Province, covering participation in the planning, implementation, monitoring, and evaluation stages, as well as the forms of community participation in tourism development. This study employed a qualitative approach using a descriptive research method. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving 10 informants consisting of local government representatives, tourism site managers, and community members. The data were analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that public participation in tourism development in Banggai Laut Regency has been relatively effective. During the planning stage, community members actively provided suggestions, ideas, and aspirations regarding tourism destination development. In the implementation stage, the community participated in maintaining environmental cleanliness, managing tourism facilities, and supporting tourism promotion activities. In the monitoring stage, community members contributed to preserving the environment and supervising the proper use of tourism facilities. Meanwhile, during the evaluation stage, the community provided feedback on tourism development programs to support future policy improvements. Public participation was reflected through contributions of labor, ideas, and direct involvement in various tourism development activities. The study concludes that public participation plays a significant role in supporting the development of tourism potential in Banggai Laut Regency. Synergistic collaboration among the government, tourism managers, and the community is essential for achieving sustainable tourism management, enhancing destination competitiveness, and generating economic, social, and environmental benefits for local communities.

Keywords: Public Participation, Tourism Development, Banggai Laut Regency.



Abstrak

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pengelola objek wisata, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut telah berjalan cukup baik. Pada tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian saran, usulan, dan aspirasi terkait pengembangan destinasi wisata. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan fasilitas, serta mendukung promosi destinasi wisata. Pada tahap pengawasan, masyarakat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengawasi pemanfaatan fasilitas wisata agar tetap berfungsi dengan baik. Sementara itu, pada tahap evaluasi, masyarakat memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pengembangan pariwisata sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kontribusi tenaga, pemikiran, serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pengembangan objek wisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing destinasi, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Pengembangan Pariwisata, Kabupaten Banggai Laut.

1. PENDAHULUAN

Keberlangsungan sektor pariwisata dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti promosi yang optimal, infrastruktur yang memadai, kemudahan akses transportasi, serta tersedianya fasilitas penunjang seperti penginapan. Salah satu subsektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah pariwisata pedesaan yang memiliki karakteristik, skala, dan fungsi berbeda dibandingkan pariwisata perkotaan. Di Indonesia, pengembangan wisata pedesaan umumnya diwujudkan melalui konsep desa wisata. Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pariwisata merupakan sektor yang diakui secara luas manfaatnya dan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai aset produktif bagi bangsa dan negara. Kemajuan pariwisata tentu saja tidak dapat mengabaikan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat lokal atau kelompok sosial

Pada Pasal 1 dan Pasal 4 Ayat 3 dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, pariwisata juga mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata, daya tarik wisata, dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan sektor tersebut. Peningkatan pariwisata budaya dan sejarah sangat penting, karena Surabaya kekurangan sumber daya alam, sementara Kota Banggai memiliki sejarah dan budaya yang kaya yang dapat dimaksimalkan. Meskipun demikian, untuk mewujudkan potensi penuh dari lokasi wisata ini, sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat dan menunjukkan kemauan untuk belajar guna mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas.



Partisipasi warga negara dikonseptualisasikan sebagai cara di mana individu, yang memiliki aspirasi dan kebutuhan yang serupa, berkontribusi pada perumusan peraturan yang mempengaruhi keberadaan mereka. Interpretasi partisipasi beragam dan beragam. Dalam konteks ini, partisipasi digambarkan sebagai keterlibatan aktif warga di setiap tingkat pembangunan, yang mencakup tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Partisipasi masyarakat diartikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan, apapun tahapannya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Kontribusi masyarakat ini dibagi atas bermacam tingkatan sesuai dengan kontribusinya. Kontribusi masyarakat secara tidak langsung dalam pengembangan atau pembangunan suatu kegiatan merupakan faktor yang sangat diperlukan dan sangat penting. Dalam proses pembangunannya, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain advokasi, pelaksanaan dan pemeliharaan. Sebagaimana diartikulasikan dalam UU No. 11 tahun 2009, kesejahteraan didefinisikan sebagai pemenuhan persyaratan material, spiritual, dan sosial warga negara, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan menumbuhkan kapasitas mereka untuk pengembangan diri, sehingga memungkinkan mereka untuk secara efektif melakukan peran sosial mereka.

Menurut Totok Mardikanto dalam, Partisipasi masyarakat adalah kontribusi masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada, pemilihan serta pengambilan keputusan mengenai alternatif solusi untuk mengatasi masalah, pelaksanaan usaha untuk menyelesaikan permasalahan, dan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi hasil akhir terkait perubahan yang terjadi. Salah satu karakteristik dari partisipasi ini adalah terbentuknya jaringan sosial baru yang semakin kuat, yang menjadi fondasi untuk melaksanakan suatu aktivitas demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari segi etimologi, kata pariwisata terdiri dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. Istilah '*pari*' berasal dari Bahasa Sanskerta dan memiliki beragam makna, antara lain '*melimpah*', '*berkeliling/memutar*', '*menuju*', '*lebih dari*', hingga makna preposisi yang merujuk pada ruang dan waktu. Sedangkan '*wisata*' berarti '*bepergian bersama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan lain-lain)*'. Oleh karena itu, dari sisi etimologi, pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang memiliki berbagai tujuan atau perjalanan yang memiliki nilai tinggi (*berlimpah*), di mana nilai tersebut dapat berupa kesempatan untuk belajar atau mengetahui hal baru, bersenang-senang, mendukung kesehatan, dan sebagainya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 mengenai pariwisata menjelaskan bahwa pariwisata mencakup berbagai aktivitas wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mengunjungi lokasi tertentu untuk bersantai, pengembangan diri, atau mempelajari daya tarik unik dari tempat yang dikunjungi dalam waktu terbatas. Dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dinyatakan bahwa pelaksanaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip manfaat, kekeluargaan, keadilan dan pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi, keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan kesatuan.

Sari dan Askari menjelaskan bahwa inti dari partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah efektivitas dan efisiensi kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harus berjalan dengan baik dan membawa hasil, serta tidak mengutamakan kepentingan individu dari beberapa kelompok. Semua pihak harus terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyusun kebijakan yang akan diambil. Hal ini berpengaruh pada individu yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan dan pendekatan dari pihak-pihak terkait, sehingga pilihan yang dinamis dapat diambil. Persyaratan dan asumsi untuk jaringan dan pertemuan ini dapat diidentifikasi dan kemudian digabungkan menjadi sebuah gagasan.

Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kondisi geografis yang unik dan penuh tantangan. Wilayah ini terdiri dari gugusan pulau-pulau yang tersebar di tengah lautan, menciptakan dinamika tersendiri bagi kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Banggai Laut terdiri dari tujuh kecamatan yang tersebar di berbagai pulau, di antaranya Kecamatan Banggai, Banggai Utara, Banggai Selatan, Banggai Tengah,



Labobo, Bangkuring, dan Boka Kepulauan. Hal ini dinyatakan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banggai Laut, Laode Kaimudin, S.E. Kemajuan inisiatif ini secara intrinsik terkait dengan pemberlakuan Keputusan Nomor 84 tahun 2010 oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banggai Laut, menandakan durasi enam tahun pembangunan berkelanjutan; tantangan utama yang dihadapi umumnya berkaitan dengan jaminan keamanan pengunjung di dalam desa wisata, yang mencakup pengunjung domestik dan internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk memperoleh informasi yang akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara naratif agar mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dengan melakukan verifikasi terhadap data sehingga temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang aktif, baik dalam (a) Pengambilan Keputusan, (b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan, serta (c) pemanfaatan hasil pembangunan dalam program pengembangan objek wisata Kabupaten Banggai Laut.

a. Partisipasi Publik Pada Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banggai Laut

Proses pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata di Banggai Laut dilakukan melalui koordinasi, musyawarah, dan keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat. Pemerintah daerah berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan, pengelolaan destinasi, hingga promosi wisata daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Laode Kaimudin, kepala dinas pariwisata Banggai Laut.:

“Dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut, kami selalu mengedepankan koordinasi dan musyawarah bersama pihak terkait serta masyarakat. Hal ini penting agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.” (hasil wawancara 10 april 2026).

Ditambahkan oleh bapak Noldi selaku kepala bidang destinasi bahwa:

“Masyarakat cukup aktif dalam memberikan masukan terkait pengembangan objek wisata di desa. Biasanya kami bersama pemerintah desa mengadakan rapat bersama masyarakat untuk membahas kebutuhan fasilitas wisata, akses jalan, serta kebersihan lingkungan wisata. Namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang aktif karena kesibukan pekerjaan. Dalam proses tersebut, kami melakukan identifikasi potensi wisata, kebutuhan infrastruktur, serta strategi promosi yang relevan. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan Pokdarwis, agar program yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.” (hasil wawancara 11 April 2026)

Wawancara dengan bapak Ajib selaku masyarakat menyatkan bahwa:

“Dalam proses pengambilan keputusan pengembangan pariwisata, pemerintah biasanya mengadakan diskusi atau pertemuan dengan masyarakat dan pihak terkait. Hal ini dilakukan agar program wisata yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat diterima oleh masyarakat”. (hasil wawancara 10 April 2026)

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pemberian masukan terkait kebutuhan fasilitas wisata, akses jalan, kebersihan lingkungan, serta keterlibatan dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengembangan UMKM, penyediaan homestay, kuliner khas, dan pertunjukan budaya.



Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata daerah.

Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya. Meskipun begitu, pemerintah tetap berupaya membangun komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat melalui rapat, diskusi, dan koordinasi bersama pemerintah desa agar program pengembangan pariwisata dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi di lapangan. Dengan adanya partisipasi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan destinasi wisata. Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam proses perencanaan, tetapi juga berperan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata. Senada dengan hal tersebut mengatakan, menerima berbagai pandangan dan masukan dari penduduk lokal memungkinkan kawasan pariwisata menciptakan pengalaman yang lebih otentik bagi pengunjung sambil mempromosikan praktik yang berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat lokal, memupuk ketahanan dan inklusivitas.

b. Partisipasi Publik Pada Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Terhadap Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banggai Laut

Pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pemberi dukungan, sedangkan masyarakat terlibat secara langsung dalam pengelolaan destinasi wisata, pelayanan kepada pengunjung, menjaga kebersihan, serta pengembangan usaha ekonomi seperti warung makan, penyewaan perahu, penginapan, dan penjualan kerajinan tangan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Laode Kaimudin, kepala dinas:

“Pengelolaan pariwisata di Banggai Laut dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara pengelolaan langsung di beberapa destinasi dilakukan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pemerintah desa. Pendekatan ini bertujuan agar pengelolaan lebih partisipatif dan berkelanjutan.” (hasil wawancara 16 April 2026).

Kemudian ditambahkan oleh bapak Noldi selaku Kepala Bidang Destinasi dan Pengembangan menyatakan:

“Menurut saya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di sekitar destinasi wisata. Masyarakat mulai merasakan manfaat ekonomi melalui peningkatan usaha kecil, jasa transportasi, kuliner, dan penginapan. Selain itu, pengembangan destinasi wisata juga mendorong masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan potensi wisata daerah. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar manfaat pengembangan pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata” (wawancara, 16 April 2026).

Ditambahkan oleh ibu Meytri selaku pengembangan pariwisata bahwa:

“Menurut kami, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata serta bertambahnya peluang usaha dan lapangan pekerjaan di sektor wisata. Selain itu, pengembangan pariwisata juga membantu memperkenalkan potensi daerah sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Ke depan, pemerintah akan terus mendorong pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.” (wawancara, 16 April 2026)

Hal senada yang dinyatakan oleh bapak Zakir selaku masyarakat Lambako yang menyatakan bahwa:

“Iya, saya sebagai masyarakat sudah mulai dilibatkan, terutama melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kami ikut berperan dalam menjaga kebersihan, mengelola tiket, serta menyediakan jasa



seperti kuliner dan penginapan. Namun, masih ada masyarakat yang belum terlibat secara aktif'. (hasil wawancara 17 April 2026).

Penjelasan yang disampaikan oleh informan itu juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ajib sebagai warga, yang menyatakan bahwa:

"Menurut saya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan destinasi wisata di daerah ini sudah cukup baik. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan area wisata, membantu keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta ikut mengelola fasilitas yang ada di lokasi wisata. Beberapa masyarakat juga membuka usaha kecil seperti warung makan, penyewaan perlengkapan, dan penjualan cendera mata untuk mendukung kebutuhan wisatawan." (wawancara dengan, 12 April 2026).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan objek wisata. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terlibat secara aktif sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan dukungan dari pemerintah agar partisipasi masyarakat dapat lebih merata dan optimal.

Pada aspek pengelolaan, pengembangan pariwisata dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah berfungsi sebagai regulator yang menetapkan kebijakan serta sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam operasional pariwisata, seperti pengelolaan destinasi, penyediaan jasa wisata, serta pengembangan usaha ekonomi kreatif. Hal tersebut di nyataan oleh partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata desa sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program dan meminimalisir konflik sosial. keterlibatan masyarakat ini sejalan dengan konsep *community-based tourism*, yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata

c. Partisipasi Publik Pada Pemanfaatan Hasil Pembangunan Terhadap Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banggai Laut

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dampak tersebut terutama terlihat dari peningkatan pendapatan masyarakat serta terbukanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, perkembangan sektor pariwisata juga membuat daerah wisata menjadi lebih maju dan berkembang dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan menjadi tolok ukur yang signifikan untuk mengetahui sejauh mana program pengembangan pariwisata dapat memberikan keuntungan nyata bagi penduduk di Kabupaten Banggai Laut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Laode Kaimudin, selaku kepala dinas Pariwisata Banggai Laut.:

"Menurut kami, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata, seperti usaha kuliner, penginapan, transportasi, dan penjualan hasil kerajinan lokal. Selain itu, pengembangan pariwisata juga mendorong pembangunan infrastruktur dan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah terus berupaya agar pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan." (wawancara, 16 April 2026)

Sama juga halnya yang di paparkan oleh bapak Darsono selaku pekerja di objek wisata Pantai Bontolan :

"Menurut saya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan membuka peluang usaha baru." (wawancara 19 April 2026).

Masyarakat merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampak dari adanya pengembangan pariwisata di suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Banggai Laut, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Manfaat tersebut dapat dilihat



dari berbagai aspek, seperti peningkatan pendapatan, terbukanya peluang usaha, serta terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Masyarakat di Kabupaten Banggai Laut telah merasakan berbagai manfaat dari pengembangan pariwisata, terutama dalam aspek ekonomi. Sejalan dengan pernyataan pariwisata merupakan alternatif kegiatan ekonomi yang potensial untuk membangun suatu wilayah, oleh sebab itu pemulihan pariwisata bisa dilakukan sejalan dengan pemulihan ekonomi. Kehadiran objek wisata memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha seperti kuliner, penjualan cendera mata, jasa transportasi, serta penginapan. Kondisi ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan wisata dan menciptakan perputaran ekonomi lokal yang lebih baik. Selain itu, berkembangnya sektor pariwisata juga mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat yang memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber penghasilan

d. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Banggai Laut

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan tempat wisata dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis atau bentuk. Kategori-kategori partisipasi masyarakat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas dan infrastruktur serta promosi. Masyarakat terlibat aktif dalam sektor pariwisata dengan memberikan jasa dan layanan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka di luar aktivitas sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Laode Kaimudi, bahwa:

“Sebagai Kepala Dinas Pariwisata, saya melihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap sarana dan prasarana dalam pengembangan wisata di Banggai Laut sangat penting. Masyarakat ikut berkontribusi melalui kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan dan perawatan fasilitas wisata, seperti jalan akses, tempat istirahat, dan lingkungan objek wisata. Selain itu, masyarakat juga menyediakan sarana pendukung seperti warung makan, penginapan, serta jasa transportasi yang membantu menunjang kebutuhan wisatawan”. (wawancara, 12 Maret 2026)

Kemudian ditegaskan oleh bapak Andi selaku masyarakat bahwa:

“Kami masyarakat berupaya menjaga fasilitas wisata agar tetap nyaman digunakan wisatawan. Jika ada kerusakan pada gazebo, tempat duduk, atau fasilitas lainnya, masyarakat biasanya ikut membantu memperbaikinya sebelum ada bantuan dari pemerintah”. (wawancara, 12 Maret 2026)

Berikut ini adalah percakapan dengan Bapak Darsono yang bekerja di kawasan wisata yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat juga ikut membantu dalam pembangunan dan perbaikan sarana wisata, misalnya melalui kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jalan menuju lokasi wisata atau membersihkan area wisata.” (wawancara, 12 Maret 2026)

Ditambahkan oleh ibu Surianti selaku anggota Pokdarwis bahwa:

“Menurut saya, partisipasi masyarakat terhadap sarana dan prasarana wisata dilakukan dengan menjaga dan merawat fasilitas yang sudah disediakan pemerintah agar tetap terpelihara dan dapat digunakan dalam jangka panjang.” (wawancara, 12 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola wisata, ketua Pokdarwis, dan pekerja wisata dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aspek fasilitas dan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Banggai Laut sudah memadai. Masyarakat terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas wisata, seperti menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki gazebo, tempat duduk, serta fasilitas umum lainnya agar tetap nyaman digunakan oleh wisatawan. Partisipasi masyarakat dalam sektor infrastruktur adalah keterlibatan masyarakat dalam penyediaan fasilitas. Elemen kunci dalam pengembangan area wisata adalah keikutsertaan warga lokal di setiap aspek yang berkaitan dengan destinasi wisata itu. Pengembangan destinasi wisata adalah penjelasan dari gagasan dasar mengenai pariwisata, yang menunjukkan bahwa masyarakat desa mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari kemajuan pariwisata.

Dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas, pengembangan pariwisata di Banggai Laut masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Ketersediaan fasilitas dasar seperti transportasi, jalan akses, penginapan, toilet umum, dan sarana kebersihan masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya tarik dan kenyamanan wisatawan.



Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi kebutuhan utama dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan

Promosi secara lisan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sebagai anggota yang berpartisipasi untuk memperkenalkan objek wisata melalui suara atau bentuk non-tulisan lainnya. Menurut wawancara dengan Bapak Laode Kaimudi, yang menjabat sebagai kepala dinas pariwisata Banggai Laut, ia menyatakan:

“Sebagai Kepala Dinas Pariwisata, saya berpendapat bahwa peran masyarakat dalam mempromosikan wisata di Banggai Laut sudah sangat baik. Masyarakat berkontribusi dalam memperkenalkan tujuan wisata melalui media sosial, kegiatan kebudayaan, serta menyebarkan informasi secara langsung kepada wisatawan dan penduduk dari daerah lain. Lebih dari itu, masyarakat aktif dalam mendukung penyelenggaraan festival dan acara pariwisata yang menarik perhatian pengunjung.” (wawancara, 13 April 2026)

Yang juga disampaikan oleh Bapak Noldi selaku ketua bidang destinasi adalah:

“Keterlibatan masyarakat dalam promosi sektor pariwisata dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang wisata melalui media sosial, berpartisipasi dalam festival atau pameran wisata, mengenalkan budaya dan potensi daerah kepada pengunjung, serta membantu mempromosikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan destinasi wisata lokal. Masyarakat juga berfungsi sebagai pendukung citra positif daerah dengan menjaga sikap ramah, kebersihan, dan kenyamanan area wisata.” (wawancara, 13 April 2026)

Berikut adalah pemaparan dari ibu Haslania selaku Ketua Pokdarwis desa Lambako:

“Beberapa individu bersedia untuk membuat video sebelum lokasi wisata ini dibuka, sehingga kami memiliki kemudahan dalam menarik perhatian pengunjung.” (wawancara, 14 April 2026)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang berpartisipasi langsung bersama pengelola akan terus mengembangkan isu-isu lokal terkait dengan destinasi wisata ini sehingga kedepannya, pengunjung tetap menjadikan tempat ini sebagai pilihan utama untuk berlibur dan menghibur keluarga mereka. Pengembangan semua sarana juga akan terus digalakkan selama itu meningkatkan kenyamanan pengunjung, itulah bentuk promosi yang akan datang.

Pada aspek promosi dan pemasaran, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pemanfaatan media sosial dan penyelenggaraan event pariwisata. Namun, strategi promosi tersebut masih belum optimal dan perlu dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan digital marketing yang lebih terarah dan profesional. Penguatan branding destinasi serta kerja sama dengan berbagai pihak, seperti agen perjalanan dan influencer, juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata Banggai Laut di tingkat regional maupun nasional.

Selain itu, aspek kelembagaan dan tata kelola juga menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai lembaga lokal memiliki peran strategis dalam mengelola destinasi dan memberdayakan masyarakat. Namun, penguatan kelembagaan masih diperlukan, terutama dalam hal kapasitas manajerial, koordinasi antar lembaga, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan pariwisata yang efektif.

Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan operasional. Pada titik ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan meningkatkan perencanaan, memperbaiki kualitas tenaga kerja, membangun infrastruktur, mengoptimalkan promosi, serta mendorong keterlibatan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah faktor utama untuk mencapai pariwisata yang bersaing dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut, yang mencakup partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan,



pengawasan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata telah mengarah pada pendekatan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan berbagai usaha ekonomi lokal. Partisipasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan destinasi wisata, meskipun manfaat yang dirasakan belum merata di seluruh wilayah. Pada aspek pengawasan, kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta luasnya wilayah pengawasan.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar mampu mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses transportasi, fasilitas umum, dan sarana pendukung wisata, disertai penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan alokasi anggaran.

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek yang lebih spesifik, seperti efektivitas sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi digital dalam promosi destinasi wisata, maupun model pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kebijakan dan praktik pariwisata di Banggai Laut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, M. R., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2023). Pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 176-196.
- Anandhyta, Annisya Rakha. "Jurnal Nasional Pariwisata" 12, no. Iv (2020).
- Fait, Taslim, Anis Ribcalia Septiana, and Rustam Tohopi. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)" 9, no. 1 (2021): 89-101.
- Latif, Adam, Muhammad Rusdi, and Dedi Setiawan. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang" 8 (2020): 26-39.
- Lilik. "Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan" 2 (2021): 163-72.
- Putu, Ni, Udayani Devi, Nyoman Dewi Utari Diah, and Ayu Ida Widnyani Sri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Timpag" 6, no. 4 (2024): 11833-38.
- Rachmawati, Intan, and Riza Firmansyah. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Alam Di Curug Bidadari Sentul, Bogor. Intan Rachmawati, Riza Firmansyah Fakultas Pariwisata-Universitas Pancasila" 7, no. 1 (2019): 47-58.
- Regina Rosita Butarbutar, Gede Nyoman Wiratanaya, Wiwik Rachmarwi, Gerry Ganika, Sri Susanty, Ika Utami Widyaningsih, Widya Nur Bhakti Pertiwi, Johannes Kurniawan, Rahmawati Madjid, Amanda Setiorini, Imanuddin Hasbi, Dhanik Puspita Sari, Lucky Nugroho, Pu, Nasobi Niki Suma. *PENGANTAR PARIWISATA*, 2021.
- Rifdah, Balqis Nadhifatur, and Susilo Kusdiwanggo. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis" 13, no. 167 (2024): 75-85.
- Sari, Puji Ana, and Saif Askari. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," no. 1 (2021): 95-106.
- Tamianingsih, T., & Eprilianto, D. F. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Community Based Tourism (Studi Kasus Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). *Publika*, 1025-1040.
- Yakobus, F. P. P., Aneta, Y., & Nani, Y. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bone Bolango (Studi Kasus Pada Wisata Hiu Paus Botubarani). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 440-456.